

SKRIPSI
PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR RODA EMPAT
PASAR ATAS SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Oleh :

MUHAMMAD ANDIKA NUGRAHA

NIM. 1910112003


Program Khusus : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023



	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Mhd Andika Nugraha	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Juni 2001	f) Tanggal Kelulusan : 10 Juli 2023	
b) Nama Orang Tua : Asman	g) Predikat : Dengan Pujian		
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,72		
d) PK : Hukum Administrasi Negara	i) Lama Studi : 4 Tahun		
e) No. BP : 1910112003			

PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR RODA EMPAT PASAR ATAS SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Muhammad Andika Nugraha, 1910112003, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK-VII), 84 Halaman, Tahun 2023, Pembimbing: Dr. Azmi Fendri, SH., M Kn dan Dr. Anton Rosari, SH., MH



ABSTRAK

Sebagai salah satu kota tujuan wisata dan perdagangan, Kota Bukittinggi diarahkan mempunyai sistem perparkiran. Karena kebutuhan tersebut, pemerintah kota Bukittinggi mengeluarkan sebuah kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka pemerintah kota mengimplementasikannya dengan jalan membangun Gedung Parkir Representatif (GPR) yang berlokasi dipusat kota. Namun dalam pelaksanaan pembangunan gedung parkir ini terdapat banyak ketimpangan didalamnya, seperti masalah kontraktor yang berganti-ganti serta status tanah gedung parkir yang tidak jelas sampa saat ini dan masih berstatus pinjam pakai. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama, yaitu: Pertama, bagaimana perolehan tanah gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi? Kedua, Bagaimana proses pengadaan pembangunan gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan empris (yuridis sosiologis), dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yang meliputi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi. Teknk pengumpulan data yakni wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status tanah dari awal sudah dihibahkan dan status tanah sudah sepenuhnya menjadi milik pemerintah Bukittinggi, tetapi sertifikat tanah tersebut belum diserahkan kepada pemerintah Bukittinggi. Selain itu dalam proses pengadaan pembangunan gedung dari kontraktor juga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mengenai permasalahan dengan kontraktor, pemerintah harus lebih ketat lagi dalam menyeleksi kontraktor yang akan ditunjuk. Karena dengan seringnya terjadi pemutusan kontrak, maka proses pembangunan gedung pun akan terhambat penyelesaiannya

Kata kunci: Peralihan Tanah, Penyerahan Gedung, Kontraktor

Abstrak telah disetujui oleh Penguji pada Tanggal 10 Juli 2023

Penguji:

Tanda Tangan		
Nama	Hj. Sri Ametti, SH., MH	Darnis, SH., MH

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara: Dr. Hengki Andora, SH., LLM



TandaTangan

Alumnus sudah diregistrasi di Fakultas/Universitas dan sudah mendapatkan nomor alumnus:

	Staf Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: